

621.07  
F  
1  
2

## KEMISKINAN DAN PEMERATAAN DI DAERAH PROYEK IRIGASI SEMARANG BARAT I

(Poverty and Equity in the West Semarang  
Irrigation Project Area I)

*Roso Witjaksono<sup>1</sup>*

03/xxxi/87

### Ringkasan

Proyek rehabilitasi jaringan pengairan terutama dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat petani yang sebagian besar termasuk dalam lapisan bawah masyarakat. Dampak proyek ini dapat antara lain dilihat pada indikator tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan petani di daerah proyek.

Patokan yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan suatu masyarakat adalah garis kemiskinan yang dicetuskan oleh Sajogyo (1982), yang mendasarkan perhitungannya pada besarnya pengeluaran rumah tangga petani dalam bentuk setara beras.

Pemerataan pendapatan petani ditentukan dengan cara pengukuran terhadap standar deviasi (S), koefisien variasi (Kv) dan Gini Ratio (GR), yang semuanya mendasarkan pada perhitungan besarnya pengeluaran rumah tangga petani sampel. Penggunaan tiga cara pengukuran tersebut secara bersama-sama akan dapat memberikan gambaran keadaan pemerataan yang lebih riil daripada hanya menggunakan salah satu cara pengukuran.

Hasil analisis menunjukkan bahwa 63,4% anggota masyarakat petani di daerah proyek berada di atas garis kemiskinan. Di antara lima kriteria daerah proyek (daerah Rehabilitasi Irigasi, daerah Banjir, daerah Tebu, daerah Tembaku dan daerah Tambak) ternyata keadaan pemerataan terbaik dijumpai di daerah Tebu dan keadaan pemerataan terburuk dijumpai di daerah Rehabilitasi Irigasi.

### 1. Pendahuluan

Usaha rehabilitasi jaringan pengairan melalui proyek-proyek yang diadakan oleh Pemerintah dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi anggota masyarakat, terutama golongan petani di pedesaan yang merupakan mayoritas di dalam jumlah populasi tetapi kecil di dalam penerimaan pendapatan. Pembangunan yang berarti juga perbaikan akan

dimanifestasikan di dalam proses pertumbuhan dari keadaan masyarakat tertentu menjadi keadaan yang lebih baik, dan hal ini di Indonesia terutama ditujukan untuk mengatasi kemiskinan yang diderita oleh lapisan bawah dalam masyarakat. Kecepatan pertumbuhan yang dimiliki oleh tiap-tiap golongan masyarakat biasanya berbeda, dan untuk memberikan gambaran besarnya perbedaan kecepatan pertumbuhan antara berbagai golongan masyarakat tersebut diperlukan adanya indikator pemerataan. Usaha pemerataan pembangunan selalu dikaitkan dengan pemberantasan kemiskinan pada lapisan masyarakat bawah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Emil Salim (1984) bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan maka berbagai peralatan kebijaksanaan dapat dipakai untuk menaikkan kelompok penduduk miskin ke atas garis kemiskinan.

Pengertian tentang kemiskinan dan pemerataan pendapatan akan menjadi semakin luas dan kabur apabila di dalam penelaahannya tidak dibatasi oleh patokan-patokan konkrit tertentu yang mudah dihitung dan dipahami melalui penalaran logis. Sehubungan dengan hal ini akan dikemukakan beberapa macam perhitungan untuk menganalisis keadaan kemiskinan dan pemerataan pendapatan masyarakat di daerah Proyek Irigasi Semarang Barat I

Proyek Irigasi Semarang Barat I merupakan salah satu usaha rehabilitasi jaringan pengairan yang wilayahnya terdapat di daerah Kabupaten Kendal. Besarnya manfaat proyek ini dapat diikuti melalui monitoring terhadap kemajuan keadaan masyarakat sekitar selama proyek berlangsung. Untuk keperluan tersebut diperlukan data dasar pada tahap permulaan proyek, yaitu berupa keadaan masyarakat di daerah tempat berlangsungnya proyek rehabilitasi pengairan, terutama yang berkaitan dengan keadaan kemiskinan dan pemerataan pendapatan keluarga atau rumah tangga petani.

Dalam analisis ini daerah proyek dibedakan atas lima kriteria, yaitu :

1. Daerah Rehabilitasi Irigasi, yaitu sebagian daerah proyek yang khusus mengalami rehabilitasi terhadap jaringan irigasinya (bukan daerah banjir). Di daerah ini diambil sejumlah 7 sampel desa secara purposif, yaitu desa-desa yang mengalami masalah kekeringan atau kekurangan air irigasi pada musim kemarau.
2. Daerah Banjir, yaitu sebagian daerah proyek yang selalu banjir dan akan mengalami rehabilitasi jaringan drainase. Di daerah ini diambil sejumlah 3 sampel desa secara purposif, yaitu desa-desa yang sering mengalami banjir pada musim penghujan atau drainasenya kurang baik.
3. Daerah Tebu, yaitu sebagian daerah proyek yang memiliki komoditi khusus tebu. Di daerah ini secara purposif diambil satu sampel desa, yaitu desa yang sebagian besar petaninya mengusahakan tanaman tebu.
4. Daerah Tembakau, yaitu sebagian daerah proyek yang memiliki komoditi khusus tembakau. Di daerah ini diambil sejumlah 4 sampel desa secara

purposive, yaitu desa-desa yang sebagian besar petaninya mengusahakan tanaman tembakau.

5. Daerah Tambak, yaitu sebagian daerah proyek yang memiliki budidaya tambak. Di daerah ini secara purposif diambil sejumlah 2 sampel desa, yaitu desa-desa yang sebagian besar petaninya mengusahakan budidaya tambak.

Di masing-masing desa sampel diambil sejumlah 20 sampel keluarga petani yang dapat mewakili kriteria daerah yang bersangkutan. Pengambilan sampel petani ini dilakukan secara acak. Dari seluruh petani sampel dapat diperoleh data pengeluaran keluarga petani yang akan digunakan sebagai dasar di dalam menentukan keadaan kemiskinan dan pemerataan pendapatan masyarakat petani di daerah Proyek Irigasi Semarang Barat I.

## 2. Kemiskinan

Lima komponen pokok yang perlu dibentuk dalam strategi pembangunan untuk mencapai suatu kehidupan yang layak dan sejahtera untuk semua warga negara adalah : pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, pemberantasan kemiskinan, pembangunan atas kaki sendiri dengan partisipasi, penggunaan kekuasaan Pemerintah, dan pembangunan lingkungan berimbang (Kirdi Dipoyudo, 1982).

Komponen-komponen tersebut juga relevan untuk diterapkan di dalam proyek rehabilitasi jaringan pengairan, terutama yang berkaitan dengan usaha memerangi kemiskinan karena masalah ini merupakan titik lemah bagi tercapainya kondisi masyarakat yang diperlukan untuk tahap lepas landas. Tingkat kemiskinan masyarakat akan ditentukan oleh taraf hidupnya, sehingga untuk mengetahui dampak hasil proyek rehabilitasi jaringan pengairan terhadap tingkat kemiskinan golongan masyarakat tertentu perlu diketahui keadaan taraf hidup masyarakat sebelum proyek berlangsung, yang selanjutnya akan diikuti perkembangannya selama berlangsungnya proyek sampai dengan menghasilkan manfaat.

Patokan atau garis yang digunakan untuk menentukan taraf hidup golongan masyarakat tertentu mendasarkan pada kriteria Sajogyo (1982), yang pendekatannya memakai data pengeluaran rumah tangga. Besarnya pengeluaran rumah tangga ini disetarakan nilainya dalam bentuk beras. Adapun pengklasifikasian taraf hidup masyarakat di desa dinyatakan dalam bentuk garis kemiskinan sebagai berikut :

1. Garis "nyaris cukup pangan" : kurang dari setara 240 kg beras/kapita/tahun.
2. Garis "miskin sekali" : pada tingkat setara 360 kg beras/kapita/tahun.
3. Garis "miskin" : pada tingkat setara 480 kg beras/kapita/tahun.

Apabila pengeluaran rumah tangga di desa lebih besar dari setara 480 kg beras/kapita/tahun berarti keadaan masyarakat di daerah tersebut berada di atas garis kemiskinan atau keadaannya "tidak miskin".

**Tabel 1. Distribusi jumlah rumah tangga petani menurut tingkat kemiskinan di daerah Proyek Irigasi Semarang Barat I (persen), tahun 1983/1984.**

Tingkat Kemiskinan	Kriteria Daerah					Total Daerah Proyek
	Rehabilitasi Irigasi	Banjir	Tebu	Tembakau	Tambak	
Nyaris cukup pangan	5	0	0	5	5	3,8
Miskin sekali	25	8	10	15	5	16,4
Miskin	15	19	5	19	18	16,4
Tidak miskin	55	73	85	61	72	63,4

Sumber : analisis data primer.

Di berbagai kriteria daerah proyek ternyata masing-masing lebih dari separuh masyarakatnya berada di atas garis kemiskinan. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan sekitar 63,4% masyarakat di daerah proyek berada di atas garis kemiskinan. Keadaan terbaik dijumpai di daerah Banjir dan di daerah Tebu, yang di samping tidak memiliki keluarga petani pada kondisi "nyaris cukup pangan" juga persentase yang berada di atas garis kemiskinan relatif besar. Berdasarkan tingkat kemiskinannya nampak adanya kecenderungan bahwa kelompok masyarakat petani yang menduduki posisi lebih baik persentase jumlah anggotanya lebih besar dibandingkan dengan kelompok di bawahnya. Hal ini menunjukkan keadaan struktur masyarakat yang sudah mulai membaik.

Dengan adanya proyek rehabilitasi jaringan pengairan diharapkan akan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat petani, yaitu melalui peningkatan produksi dan pendapatan usahataniannya. Semakin besar pendapatan keluarga petani berarti akan meningkatkan daya beli mereka sehingga pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga akan semakin besar. Dengan menggunakan tolok ukur pengeluaran keluarga ini dapat diketahui perbaikan taraf hidup masyarakat petani sebagai akibat dampak adanya proyek pengairan. Peningkatan taraf hidup masyarakat nantinya akan ditunjukkan dengan semakin kecilnya persentase jumlah anggota masyarakat petani pada lapisan bawah dan diikuti dengan semakin besarnya persentase jumlah anggota masyarakat petani pada lapisan di atasnya. Untuk mencapai suatu keadaan masyarakat di daerah Proyek Irigasi Semarang Barat I yang semua anggotanya bebas dari kemiskinan diperlukan adanya usaha untuk menaikkan taraf hidup sekitar 36,6% jumlah anggota masyarakat.

kemiskinan. Apabila ditinjau dari kriteria daerahnya maka sasaran terbesar di dalam usaha memerangi kemiskinan masyarakat petani dijumpai di daerah Rehabilitasi Irigasi (45%), sedangkan sasaran terkecil dijumpai di daerah Tebu (15%).

### 3. Pemerataan

Golongan petani miskin di pedesaan memiliki berbagai kelemahan, yaitu antara lain : kualitas tenaga kerja yang rendah, modal kurang memadai dan sumber alam yang kadang-kadang kurang mendukung. Menurut Emil Salim (1984), semakin dalam orang tenggelam dalam jurang kemiskinan semakin banyak pula tuntutan perbaikan mutu terhadap faktor-faktor yang diperlukan untuk keluar dari jurang tersebut. Dalam hubungan inilah penerapan kebijaksanaan pemerataan menjadi penting untuk mendobrak kelemahan dan kekurangan kelompok penduduk miskin.

Keberhasilan proyek pengairan tidak dapat diukur hanya dengan adanya kenaikan penghasilan masyarakat, karena yang penting bukan hanya berapa banyak yang telah dihasilkan, tetapi apa yang dihasilkan dan bagaimana penghasilan tersebut dibagi. Oleh karena itu di dalam menilai keberhasilan proyek, sejak dari perencanaan sampai dengan hasil pelaksanaannya, aspek pemerataan menjadi salah satu bahan pertimbangan utama, sehingga diperlukan suatu ukuran tentang keadaan pemerataan dalam masyarakat di lokasi proyek atau yang terkena dampak proyek. Untuk menentukan keadaan pemerataan biasanya menggunakan indikator tingkat pendapatan tiap rumah tangga dalam masyarakat yang bersangkutan. Apabila proyek pengairan terutama dimaksudkan untuk memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat golongan ekonomi lemah maka diharapkan kesenjangan tingkat pendapatan antara lapisan masyarakat bawah dan lapisan masyarakat atas akan menciut sesudah dapat dinikmatinya hasil proyek oleh masyarakat. Hal ini dapat dicapai apabila distribusi pendapatan lebih merata, yang dapat tercermin pada keadaan pemerataan pendapatan yang semakin membaik, artinya setiap anggota masyarakat memperoleh pendapatan yang besarnya tidak jauh dari tingkat pendapatan rata-rata penduduk di daerah yang bersangkutan.

Di dalam analisis berikut ini distribusi pendapatan yang akan menggambarkan keadaan pemerataan dalam masyarakat diukur dengan tiga cara, yaitu dengan :

1. Pengukuran terhadap standar deviasi (S)
2. Pengukuran terhadap koefisien variasi (Kv), dan
3. Pengukuran angka "Gini Ratio" (GR) atau indeks gini.

Masing-masing cara pengukuran tersebut secara bersama-sama akan diterapkan terhadap pendapatan masyarakat petani di daerah proyek pengairan.

Untuk mengukur pemerataan pendapatan di sini digunakan dengan pendekatan tingkat pengeluaran keluarga petani. Dengan pendekatan tingkat pengeluaran ini akan diperoleh gambaran keadaan pemerataan yang lebih riil dibandingkan dengan pendekatan tingkat pendapatan yang diterima oleh tiap-tiap keluarga petani. Hal ini disebabkan karena biasanya besarnya pengeluaran suatu keluarga relatif stabil dari waktu ke waktu, sedangkan besarnya pendapatan keluarga bervariasi dengan fluktuasi yang tinggi.

### 1. Pengukuran standar deviasi (S)

Standar deviasi merupakan salah satu indikator statistik yang dapat menggambarkan hasil dispersi nilai-nilai di sekitar rata-ratanya. Semakin besar angka standar deviasi berarti semakin besar jumlah nilai-nilai yang menyimpang dari rata-ratanya. Apabila diterapkan di dalam pengukuran pemerataan pendapatan penduduk di suatu daerah maka angka standar deviasi yang besar dapat menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang buruk, karena berarti di daerah tersebut terjadi kesenjangan tingkat pendapatan yang lebar di antara beberapa lapisan masyarakat. Dengan perkataan lain bahwa semakin besar angka standar deviasi maka semakin buruk keadaan pemerataan pendapatan di suatu daerah.

Rumus yang dipergunakan di dalam menghitung standar deviasi adalah sebagai berikut :

$$S = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

Keterangan : S = standar deviasi  
 $X_j$  = harga untuk sampel ke-i  
 $\bar{X}$  = harga rata-rata  
 n = jumlah sampel.

### 2. Pengukuran terhadap koefisien variasi (Kv)

Koefisien variasi sebenarnya mempunyai arti yang hampir sama dengan standar deviasi di dalam menentukan pemerataan pendapatan, tetapi koefisien variasi dapat menggambarkan keadaan pemerataan yang lebih riil, karena di samping nilai standar deviasi diikutkan pula nilai rata-rata ( $\bar{X}$ ) untuk mengukur pemerataan pendapatan di suatu daerah. Adapun bentuk rumusnya adalah sebagai berikut :

$$Kv = \frac{S}{\bar{X}}$$

Keterangan : Kv = koefisien variasi  
 S = standar deviasi  
 $\bar{X}$  = harga rata-rata

### 3. Penentuan angka Gini Ratio (GR) atau Indeks Gini

Penentuan standar deviasi dan koefisien variasi lebih menekankan pada pemerataan pendapatan untuk individu-individu keluarga petani, sedangkan penggunaan Gini Ratio lebih menekankan pada pemerataan pendapatan kelompok-kelompok keluarga petani.

Untuk pengukuran besarnya nilai GR digunakan rumus sebagai berikut :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_i (y_i + y_{i-1})$$

Keterangan : GR = Gini Ratio

$y_i$  = proporsi secara kumulatif dari jumlah pendapatan

$f_i$  = proporsi jumlah keluarga petani

$k$  = jumlah kelompok keluarga petani.

Di dalam perhitungan ini populasi dibagi menjadi lima kelompok ( $k = 5$ ), sehingga untuk tiap kelompok proporsi jumlah petani 0,2 atau 20%. Di dalam ketentuan disebutkan bahwa GR akan mendekati angka satu apabila pemerataan pendapatan memburuk, dan sebaliknya akan mendekati nol jika pemerataan pendapatan membaik.

### 4. Hasil penerapan S, Kv dan GR sebagai indikator pemerataan

Dengan menggunakan data pengeluaran keluarga petani di daerah Proyek Irigasi Semarang Barat I diperoleh besarnya angka-angka S, Kv dan GR seperti pada tabel 2.

**Tabel 2. Angka-angka S, Kv dan GR di daerah Proyek Irigasi Semarang Barat I, tahun 1983/1984.**

Kriteria Daerah	Standar Deviasi Koefisien variasi Gini Ratio					
	(S)		(Kv)		(GR)	
	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat
Rehab. Irigasi	391.137	III	0,546	V	0,251	V
Banjir	467.311	IV	0,468	III	0,228	III
Tebu	378.658	II	0,367	I	0,186	I
Tembakau	216.777	I	0,386	II	0,198	II
Tambak	481.319	V	0,478	IV	0,231	IV
Total Daerah Proyek	421.643		0,538		0,258	

Sumber : analisis data primer.

Pada tabel 2 dapat dibandingkan keadaan pemerataan pada masing-masing kriteria daerah dan dapat ditentukan pula urutan tingkat pemerataan pendapatan, dari tingkat yang terbaik (tingkat I) sampai dengan tingkat yang terburuk (tingkat V). Dengan menggunakan tiga cara pengukuran pemerataan yang telah diuraikan ternyata menghasilkan urutan tingkat yang berbeda antara penggunaan angka standar deviasi (S) dengan penggunaan angka koefisien variasi (Kv) dan Gini Ratio (GR). Pengukuran pemerataan secara individual terhadap tiap-tiap keluarga petani, yang dalam hal ini digunakan angka S dan Kv, dihasilkan urutan yang berbeda, yaitu dengan angka S tingkat pemerataan yang terbaik di daerah Tembakau dan terburuk di daerah Tambak; sedangkan dengan angka Kv diperoleh tingkat pemerataan terbaik di daerah Tebu dan yang terburuk di daerah Rehabilitasi Irigasi. Hal ini menunjukkan bahwa angka S yang relatif besar belum tentu diikuti oleh angka Kv yang besar pula, karena di dalam menghitung Kv besarnya rata-rata pendapatan ( $\bar{X}$ ) sangat menentukan. Oleh karena itu, dapat dijumpai suatu daerah dengan angka S yang lebih besar daripada daerah lain mempunyai angka Kv yang lebih kecil, karena angka  $\bar{X}$  nya jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah lain tersebut.

Apabila dijumpai keadaan semacam ini, yaitu adanya perbedaan hasil yang diperoleh melalui pengukuran S dengan hasil yang diperoleh melalui pengukuran Kv, maka perhitungan pemerataan melalui Kv dipandang lebih baik dibandingkan dengan perhitungan melalui S, karena besarnya penyimpangan relatif terhadap  $\bar{X}$  lebih dapat menggambarkan keadaan pemerataan daripada hanya menilai besarnya penyimpangan absolut tanpa mempertimbangkan angka  $\bar{X}$  nya.

Hasil pengukuran pemerataan secara kelompok dengan menggunakan angka GR juga dapat dijadikan dasar untuk menentukan urutan tingkat pemerataan pada masing-masing kriteria daerah. Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa urutan tingkat pemerataan yang diperoleh dengan angka GR sama dengan urutan tingkat pemerataan yang diperoleh dengan Kv. Hal ini berarti akan semakin memperkuat kebenaran hasil pengukuran pemerataan dengan Kv dibandingkan dengan hasil pengukuran angka S.

Apabila proyek pengairan dimaksudkan untuk menolong golongan petani berpendapatan rendah, maka dengan adanya proyek tersebut nantinya diharapkan keadaan pemerataan ini akan menjadi semakin baik, yang dapat ditunjukkan dengan semakin kecilnya masing-masing angka standar deviasi (S), koefisien variasi (Kv) dan Gini Ratio (GR) yang tercantum pada tabel 2. Bagi daerah yang tingkat pemerataannya relatif buruk, seperti daerah Rehabilitasi Irigasi dan daerah Tambak, perlu diperhatikan agar alokasi manfaat proyek untuk masyarakat lapisan bawah porsinya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang pemerataannya sudah baik seperti daerah Tebu dan daerah Tembakau.



#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang kemiskinan dan pemerataan yang dapat digunakan sebagai indikator di dalam menilai manfaat dampak proyek pengairan di daerah Irigasi Semarang Barat I, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Manfaat suatu proyek pengairan dapat ditinjau dengan menggunakan indikator keadaan kemiskinan dan pemerataan masyarakat di daerah proyek.
2. Perkembangan masyarakat yang mengarah pada keadaan yang lebih baik dapat ditunjukkan dengan semakin kecilnya persentase jumlah penduduk yang termasuk dalam taraf hidup terbawah (nyaris cukup pangan) dan diikuti oleh semakin besarnya persentase jumlah penduduk yang berada pada taraf hidup di atasnya. Dengan perkataan lain bahwa manfaat proyek dapat ditunjukkan dengan adanya pergeseran persentase jumlah penduduk dari taraf hidup paling bawah (nyaris cukup pangan) menuju ke taraf hidup yang paling tinggi (tidak miskin).
3. Di dalam penentuan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan digunakan pendekatan pengeluaran keluarga petani, karena besarnya pengeluaran suatu keluarga relatif stabil dari waktu ke waktu dibandingkan dengan besarnya pendapatan keluarga yang biasanya bervariasi dengan fluktuasi yang tinggi.
4. Penentuan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat dapat menggunakan berbagai cara pengukuran, yaitu antara lain dengan pengukuran standar deviasi (S), koefisien variasi (Kv) dan Gini Ratio (GR).
5. Hasil penentuan tingkat pemerataan pendapatan yang diperoleh dengan penggunaan masing-masing cara pengukuran tersebut tidak selalu sama, sehingga ada kemungkinan hasil pengukuran yang diperoleh dengan satu cara saja dapat bersifat bias. Oleh karena itu penggunaan berbagai cara pengukuran akan dapat membantu di dalam penentuan tingkat pemerataan yang lebih riil, karena dari berbagai hasil pengukuran tersebut dapat diadakan pemilihan terhadap alternatif yang baik.
6. Di dalam penentuan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat secara individual, cara pengukuran koefisien variasi (Kv) lebih mendekati keadaan riil dibandingkan dengan pengukuran standar deviasi (S). Penentuan tingkat pemerataan ini dapat juga ditinjau dari masing-masing kelompok tertentu dengan angka Gini (GR). Adanya persamaan hasil antara yang diperoleh dari pengukuran individual dan pengukuran kelompok akan lebih mencerminkan keadaan pemerataan secara riil.

**Pustaka**

- Emil Salim. 1984. "Kebijaksanaan Pemerataan Mengatasi Kemiskinan", dalam Selo Soemardjan, Alfian & Mely G. Tan (eds), *Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai*. PT Sankala Pulsar, Jakarta. pp. 31 — 43.
- Irlan Soejono. 1978. *Metodologi Penelitian Distribusi Pendapatan di Pedesaan*. Makalah pada Konferensi Nasional V Perhepi di Jakarta.
- Kirdi Dipoyudo. 1982. "Pemerataan Kesejahteraan Tujuan Pembangunan", *Analisa*. Vol. 7. pp. 593 — 607.
- Mubyarto, Sayogyo & S. Tjondronegoro, 1982. "Poverty, Equity, and Rural Development", dalam Mubyarto (ed), *Growth and Equity in Indonesian Agricultural Development*. Yayasan Agro Ekonomika. pp. 216 — 48.
- Sayogyo. 1982. *Menelaah Garis Kemiskinan*. Makalah pada Lokakarya Metodologi Kaji-Tindak, Proyek P4K di Cisarua 20 — 23 Des. 1982.